



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



ARAHAN

MENTERI DALAM NEGERI

PADA PEMBUKAAN ORIENTASI/ RETRET KEPALA DAERAH DI MAGELANG

Oleh:

Muhammad Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri RI

Magelang, 22 Februari 2025



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id



SISTEMATIKA

- I. RETREAT KDH DAN WKDH
- II. KAPASITAS FISKAL APBD
- III. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI DUNIA DAN INDONESIA
- IV. ARAHAN PRESIDEN: KEBERSIHAN LINGKUNGAN (SAMPAH, BALIHO, TOILET)
- V. MAL PELAYANAN PUBLIK DAN *EMERGENCY CALL*





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



I. RETRET KDH DAN WKDH



DASAR HUKUM

- ❑ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 374 dan 375 tentang Binwas
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- ❑ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2023 tentang Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- ❑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5 - 1834 Tahun 2023 Tgl 29 November 2023 tentang Pedoman Teknis Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah





KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

TUJUAN PELAKSANAAN



Pemahaman Tugas Pokok Kepala Daerah



Pemahaman menyeluruh Asta Cita dan Program Kerja Kementerian/Lembaga



Membangun chemistry, emotional bonding dan *team building*



Tata kelola pemerintahan yang bersih dengan prinsip-prinsip *good governance*



Dialog interaktif Pusat dan Daerah



Menguatkan nasionalisme serta wawasan kebangsaan Kepala Daerah



PESERTA **503** KEPALA DAERAH



GUBERNUR

34

BUPATI

380

WALI KOTA

89



458



45

<40

71

40 - 50

164

>51 - 60

194

>60

74



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PESERTA HADIR

| **450** PESERTA HADIR

| **53** TIDAK HADIR

| **5** SAKIT

| **1** IZIN BERSURAT

| **47** TIDAK ADA KABAR

MITIGASI KESEHATAN

| **15** MERAH

| **22** KUNING

| **413** HIJAU



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



KANTOR KOMUNIKASI
KEPRESIDENAN

MEDIA CENTER

KEPANGKATAN
PERANGKAT
2025-2030

AKADEMI MILITER MAGELAN
21 - 28 FEBRUARI

10 TV | **21** MEDIA ONLINE | **2** MEDIA CETAK | **2** RADIO



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

44 NARASUMBER





KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

MATERI

**PROGRAM KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA**

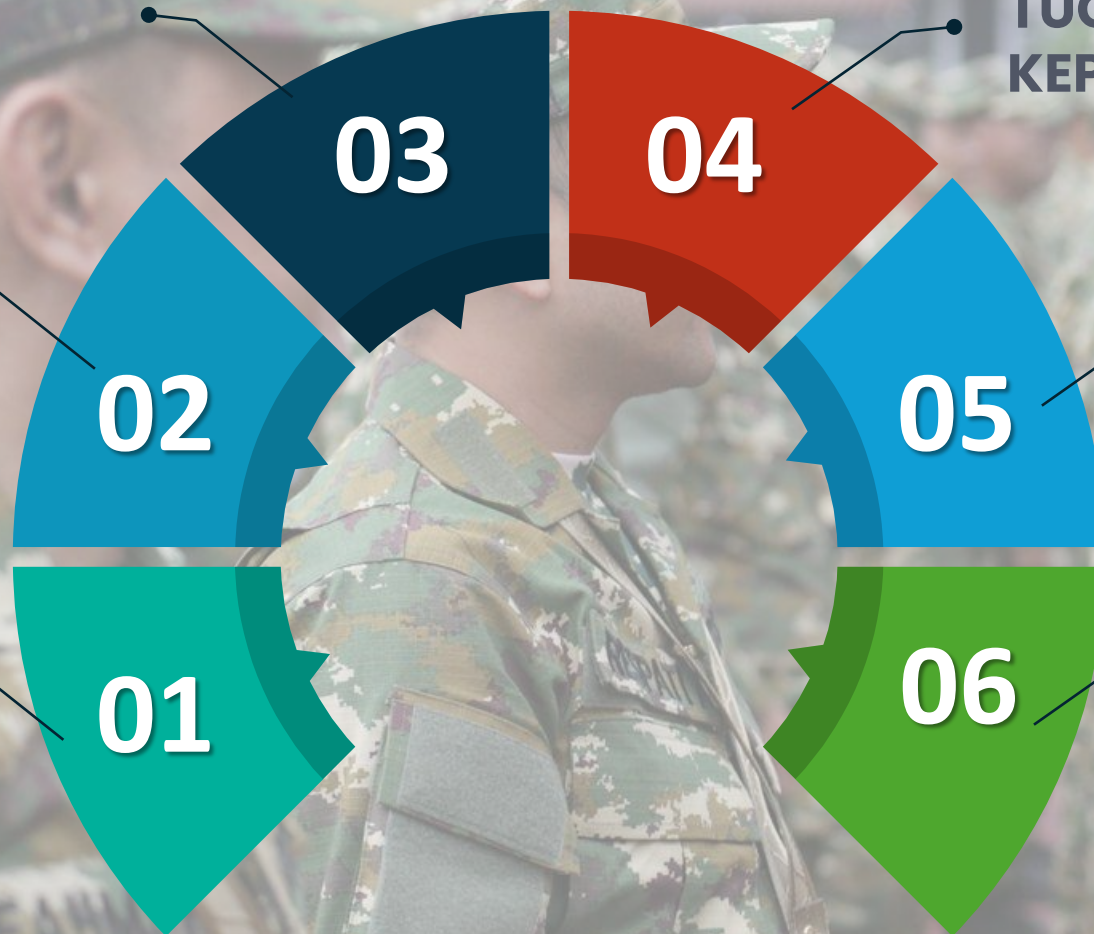
**TUGAS DAN FUNGSI
KEPALA DAERAH**

ASTA CITA

**KEPEMIMPINAN DAN
KOMUNIKASI POLITIK**

**KETAHANAN
NASIONAL
DAN
WAWASAN
KEBANGSAAN**

TEAM BUILDING



ORIENTASI/RETREAT KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2025

Penyelenggara



Waktu dan Lokasi



- Jumat 21 Feb 2025-Jumat 28 Feb 2025 (**7 Hari**)
- **Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang**, Jawa Tengah
JL. Jend. Gatot Subroto No.1 Magersari



Peserta

503 Kepala Daerah



- Terdiri dari **34 Gubernur, 380 Bupati, dan 98 Wali Kota**
- Terdiri dari: **458 Laki-Laki, dan 45 Perempuan**

Materi & Narasumber

40 Narasumber

6 Agenda: Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan, Asta Cita, Program K/L, Tuga dan Fungsi Kepala Daerah, Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, dan Team Building

Retreat Sebagai Bentuk Efisiensi

- **Menyatukan Program Lemhanas:** patriotisme dan nasionalisme dan **program Kemendagri:** orientasi KDH dan WKDH,
- Sedianya masing-masing program dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan 14 hari, **digabung menjadi 7 (tujuh) hari**



Manfaat Retreat Kepala Daerah

1. **Sebagai forum bisa saling mengenal** satu sama lain dalam suasana informal sehingga **terbentuk emotional bonding**
2. **Meningkatkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, membuat program pro rakyat** (nilai, rasa kebersamaan/egaliter diberikan treatment yang sama terlepas dari strata sosialnya)
3. **Harmonisasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah yang efisien** (supaya tidak terjadi *overlapping*)
4. **Meningkatkan optimalisasi Tata Kelola pemerintahan yang bersih** dengan prinsip-prinsip good governance
5. Meningkatkan Pemahaman Kepala Daerah terkait **Visi, Misi dan Program Nasional (contoh program MBG)**
6. Daerah mendapatkan bekal awal untuk mengelola **anggaran daerah (total seluruh daerah 1.300 T)** dengan baik

Pelaksanaan Retreat Kepala Daerah, memangkas biaya yang sangat besar, dan menjadi lebih efisien dalam menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

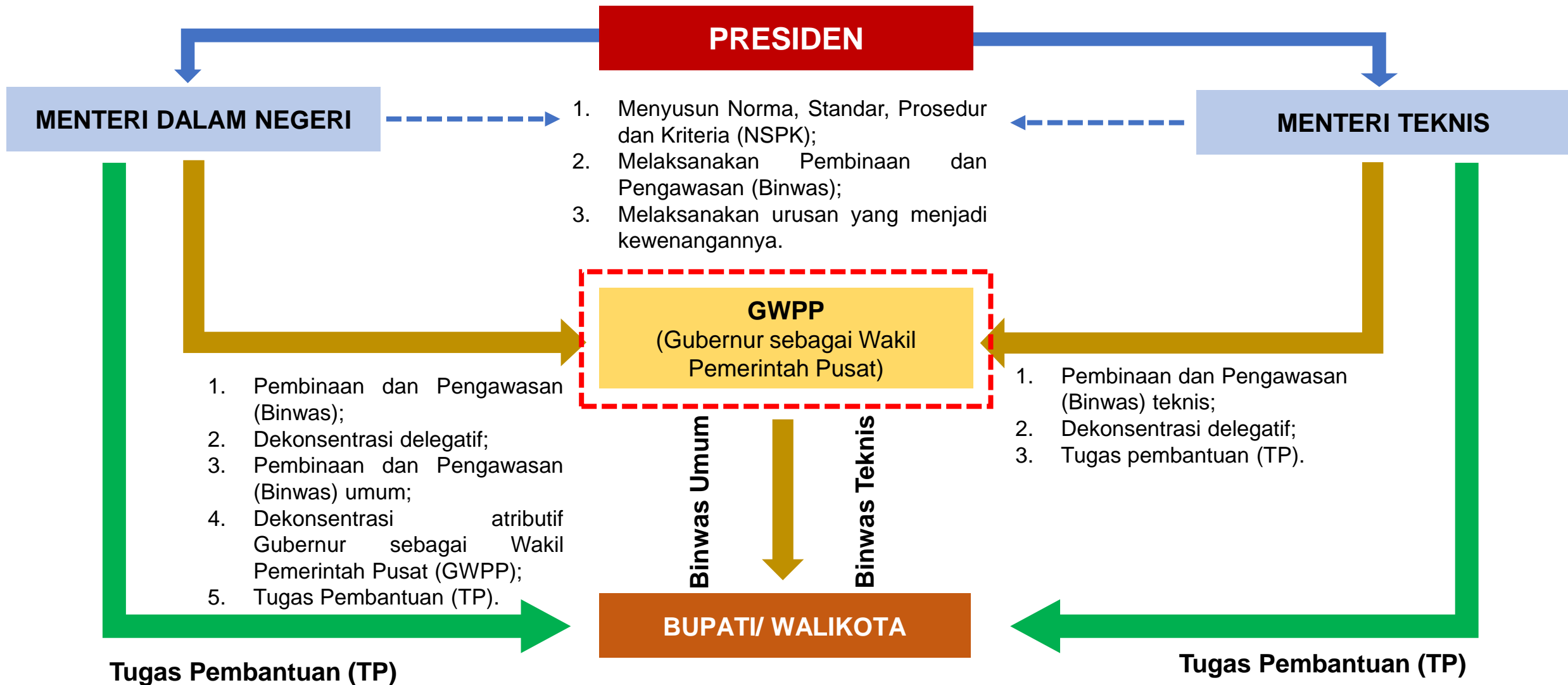
REPUBLIK INDONESIA

KEPALA DAERAH PETAHANA

□ GUBERNUR 7
□ WALI KOTA 14
□ BUPATI 87



GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (GWPP)

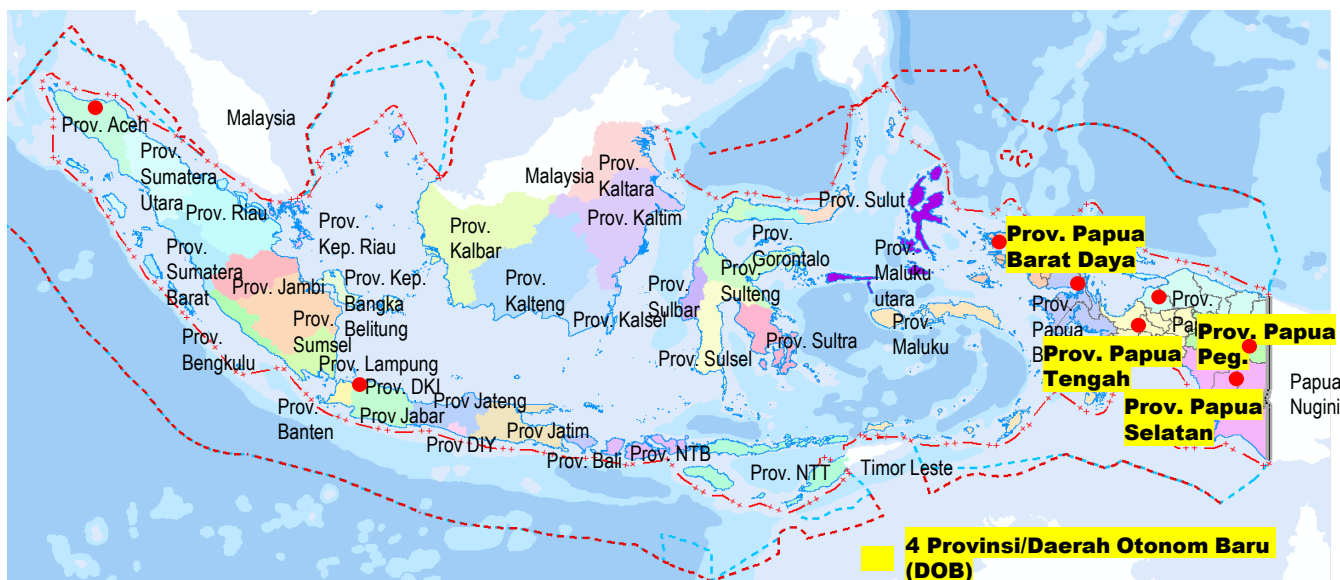


Total Jumlah Daerah Provinsi
dan Kab/Kota

: 552

Wilayah	Sebelum Reformasi 1998	Sesudah Reformasi (1999 s.d Juli 2023)	Peningkatan
Provinsi	26	38	12 (46,1%)
Kabupaten	234	416	182 (77,7%)
Kota	59	98	39 (66,1%)
Kecamatan	5.480	7.277	1.797 (32,7%)
Kelurahan	5.935	8.498	2.563 (43,1%)
Desa	59.834	75.265	15.431 (25,7%)

Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Indonesia



Berdasarkan: Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Ditetapkan 9 November 2022)

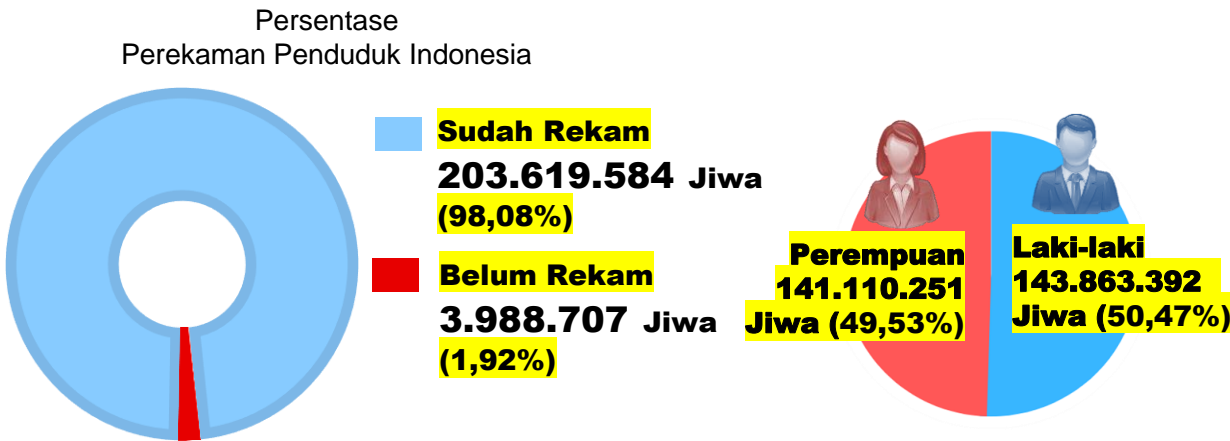
Kekhususan di Beberapa Daerah

- Aceh** **UU No. 11 Tahun 2006** tentang Pemerintahan Aceh (ditetapkan 01 Agustus 2006)
- DKI** **UU No. 2 Tahun 2024** tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (ditetapkan tanggal 25 April 2024)
- DIY** **UU No. 13 Tahun 2012** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (ditetapkan 31 Agustus 2012)
- Papua** **UU No. 2 Tahun 2021** Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Ditetapkan tanggal 19 Juli 2021)
- Pap Sel** **UU No. 14 Tahun 2022** Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Ditetapkan tanggal 25 Juli 2022)
- Pap Teng** **UU No. 15 Tahun 2022** Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Ditetapkan tanggal 25 Juli 2022)
- Pap Peg** **UU No. 16 Tahun 2022** Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Ditetapkan tanggal 25 Juli 2022)
- Pap Bar** **UU No. 2 Tahun 2021** Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Ditetapkan tanggal 19 Juli 2021)
- Pap Bar Daya** **UU No. 29 Tahun 2022** Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Ditetapkan tanggal 8 Desember 2022)



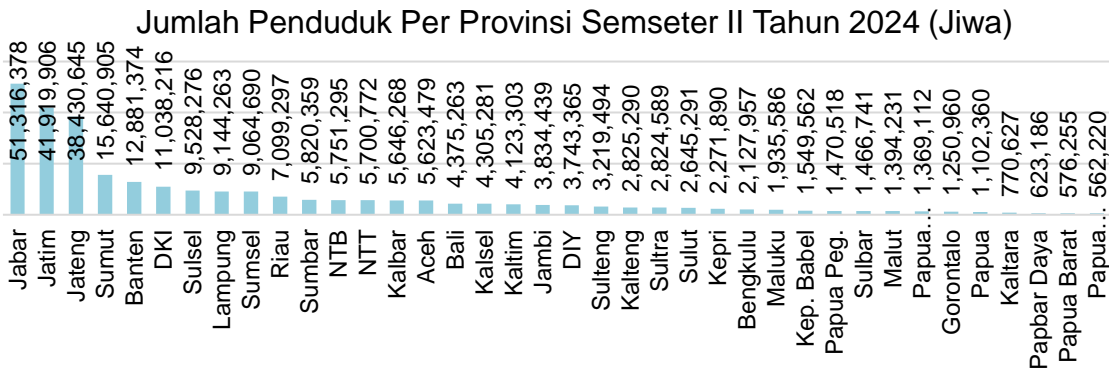
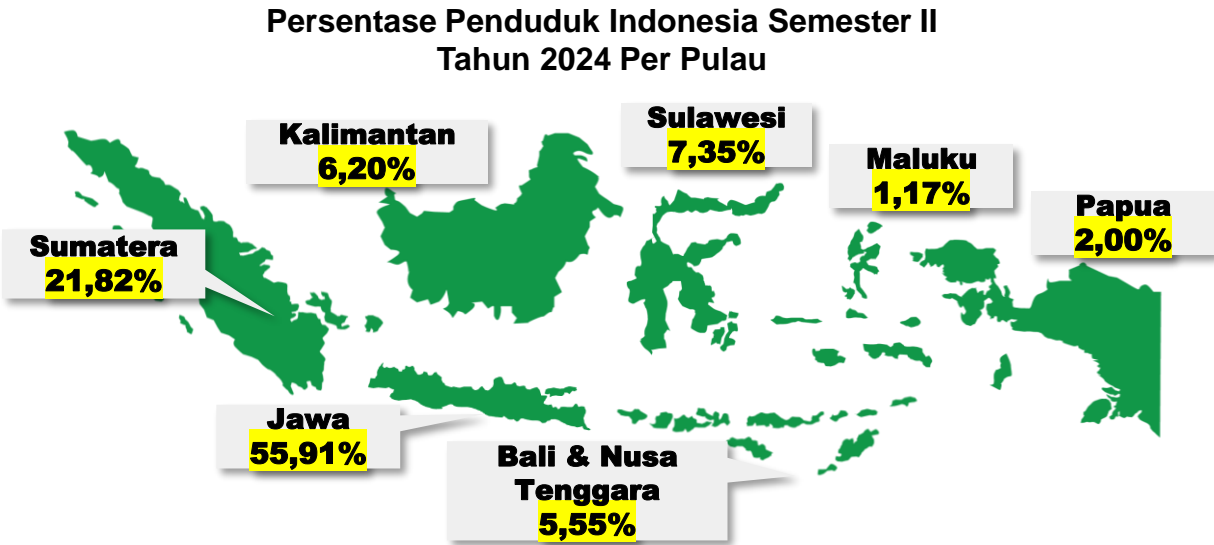


Data Kependudukan Indonesia
Semester II Tahun 2024 : **284.973.643** Jiwa



Indonesia Merupakan Negara Nomor 4 dengan
Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia

1		India	1,453,277,442	6		Nigeria	233,553,326
2		China	1,418,734,507	7		Brazil	212,146,270
3		U.S.A.	345,761,963	8		Bangladesh	173,946,617
4		Indonesia	284.973.643	9		Russia	144,670,473
5		Pakistan	251,982,632	10		Ethiopia	132,673,556



APBN TA 2025



Total APBN TA 2025 sebesar **Rp.3.621,31 Triliun**

(Sesuai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
sebesar **Rp.2.701,44 Triliun**

Transfer ke Daerah (TKD)
sebesar **Rp.919,87 Triliun**

DBH
Rp.192,28 T

DAU
Rp.446,63 T

DAK
Rp.185,24 T

Dana
Otsus
Rp.17,52 T

Dana
Keistimewaan
Rp.1,2 T

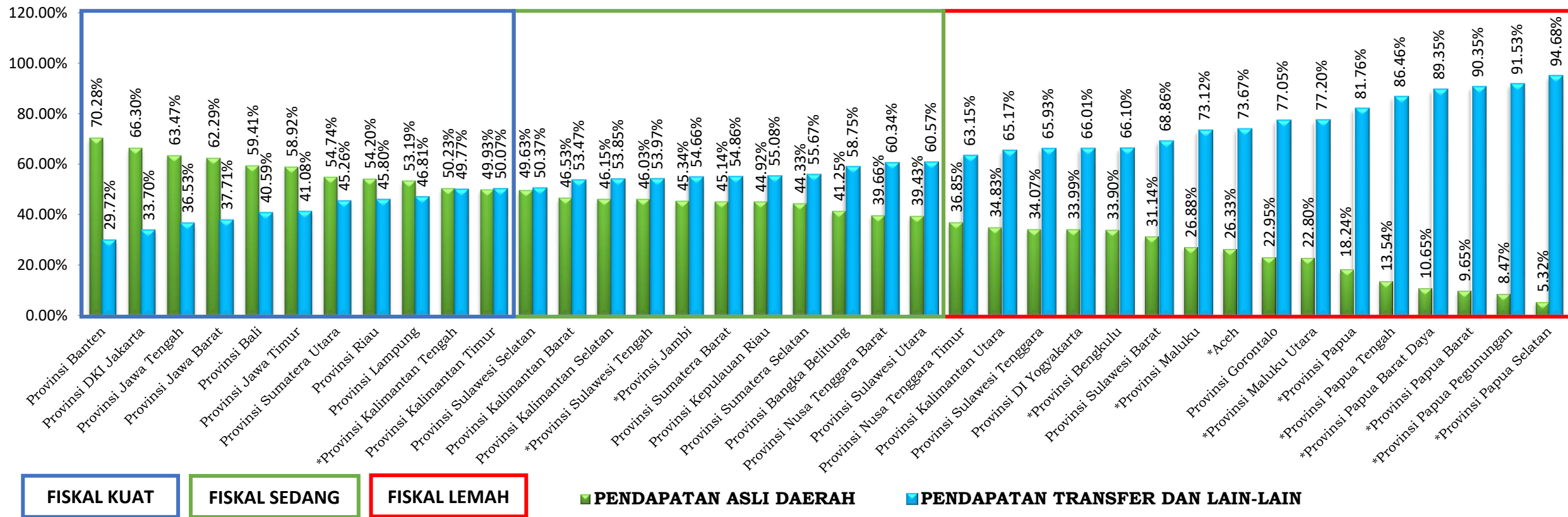
Dana
Desa
Rp.71 T

Sejalan dengan RKP, APBN Tahun 2025 mengusung tema
“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

PROVINSI TA 2025

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas fiskal yaitu:

- Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih Kuat dari pendapatan transfer pusat.
- Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).



FISKAL KUAT

FISKAL SEDANG

FISKAL LEMAH

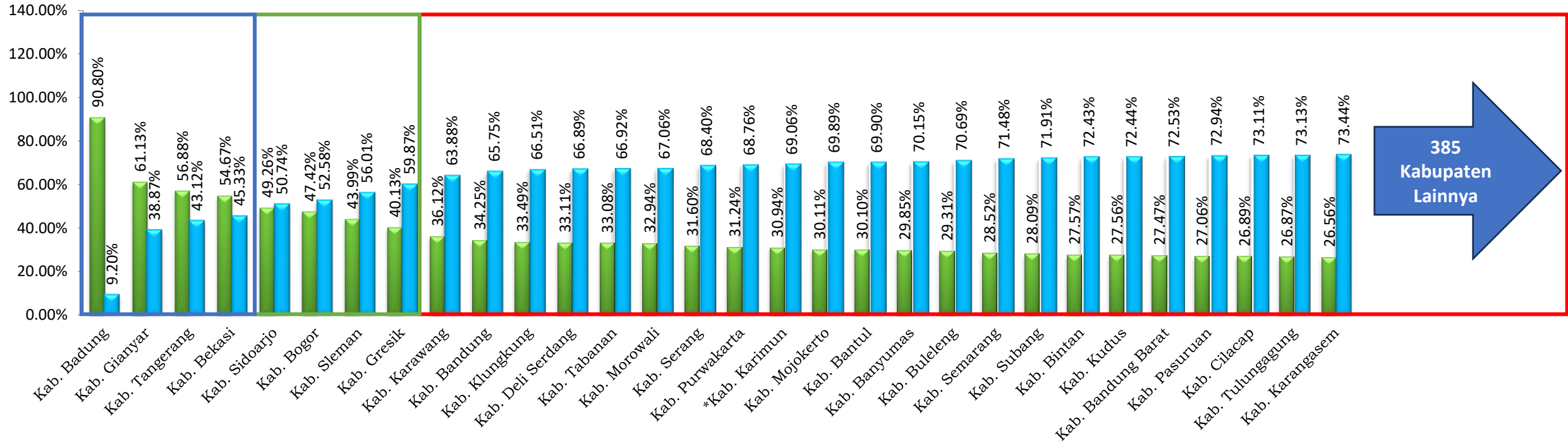
PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN

KABUPATEN TA 2025

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas fiskal yaitu:

- Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih Kuat dari pendapatan transfer pusat.
- Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).



385
Kabupaten
Lainnya

FISKAL KUAT

FISKAL SEDANG

FISKAL LEMAH

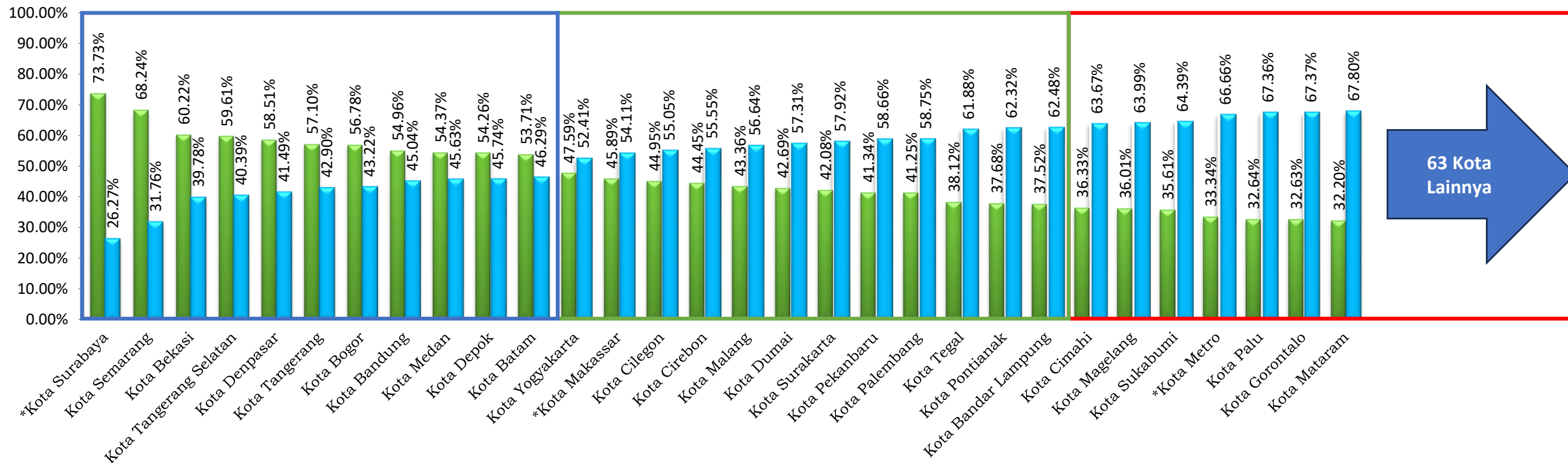
■ PENDAPATAN ASLI DAERAH

■ PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN

KOTA TA 2025

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas fiskal yaitu:

- Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih Kuat dari pendapatan transfer pusat.
- Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).



63 Kota Lainnya

FISKAL KUAT

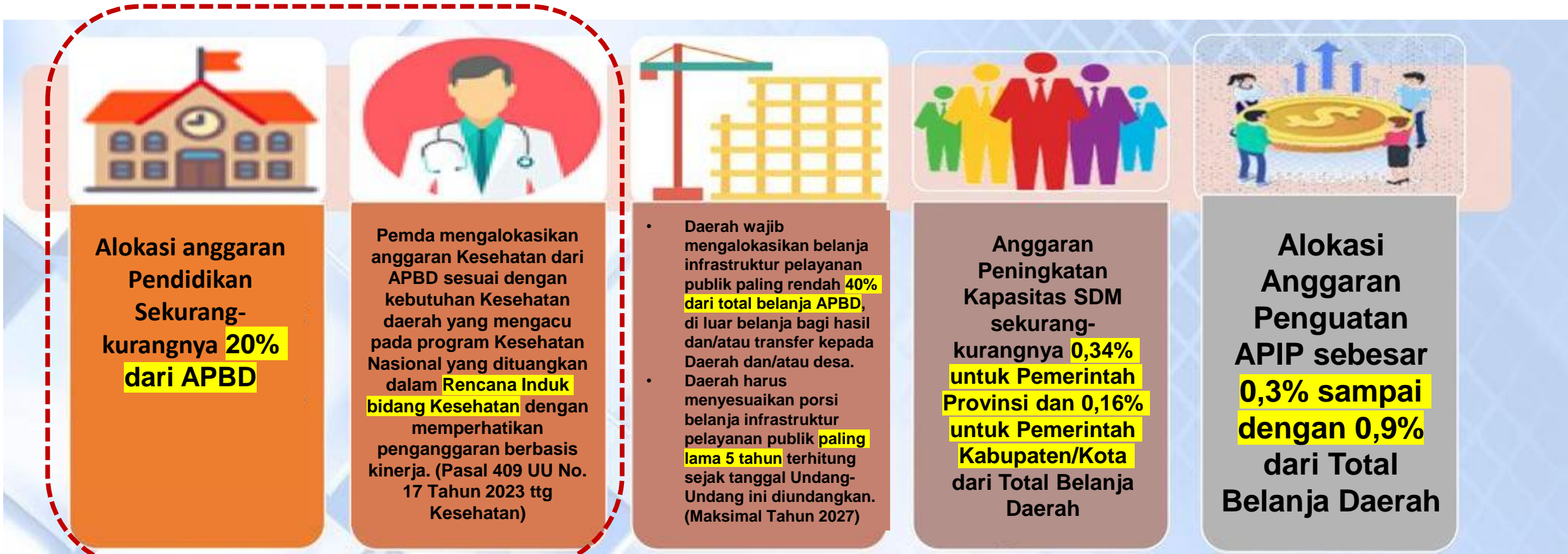
FISKAL SEDANG

FISKAL LEMAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN TRANSFER DAN LAIN-LAIN

KEWAJIBAN DAERAH DALAM ALOKASI ANGGARAN



TIDAK HANYA **SENT**, TAPI **DELIVERED**



STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

PENDAPATAN



1. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah.
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dipisahkan, berdasarkan **Permendagri No. 77 Tahun 2020** terdiri dari:
 - 1) Hasil penjualan BMD; 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 3) Hasil kerja sama daerah; 4) Jasa giro; 5) Hasil pengelolaan dana bergulir; 6) Pendapatan bunga; 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 8) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; Pendapatan dari pengembalian; 9) Pendapatan dari BLUD; dll.

2. Pendapatan Transfer

- **Transfer Ke Daerah**, berdasarkan **UU No. 1 Tahun 2022** terdiri dari:
 - 1) DBH; 2) DAU; 3) DAK; 4) Dana Otsus; 5) Dana Keistimewaan; 6) Dana Desa; 7) Insentif Fiskal
- **Transfer Antar Daerah**, berdasarkan **PP No. 12 Tahun 2019** terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- Hibah
- BUMD
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan sesuai Peraturan

BELANJA



1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

- Belanja Modal Tanah
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN



1. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

2. Pengeluaran Pembiayaan

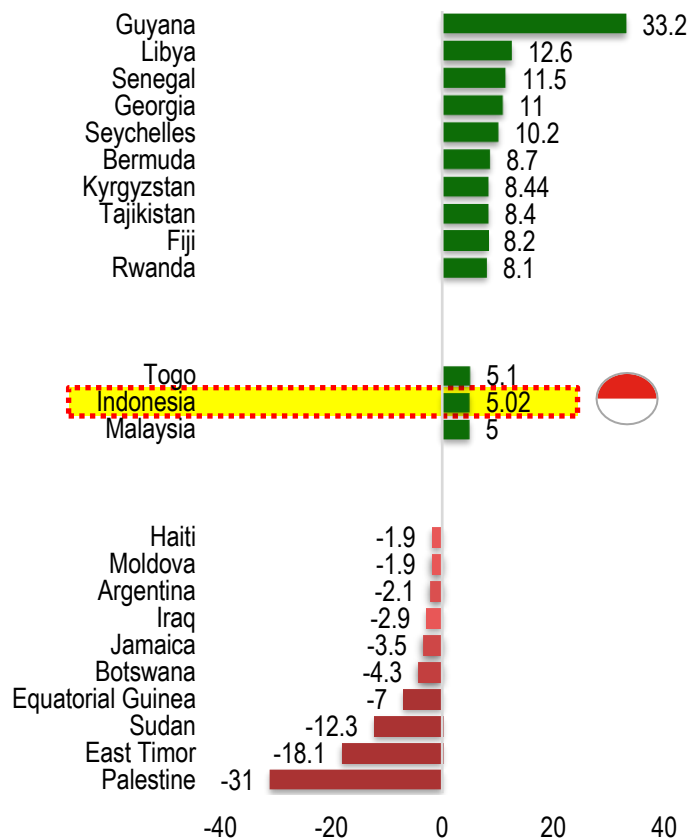
- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Peraturan

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

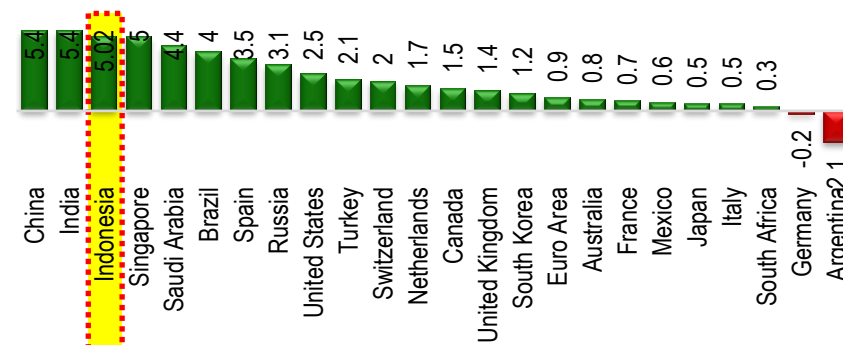




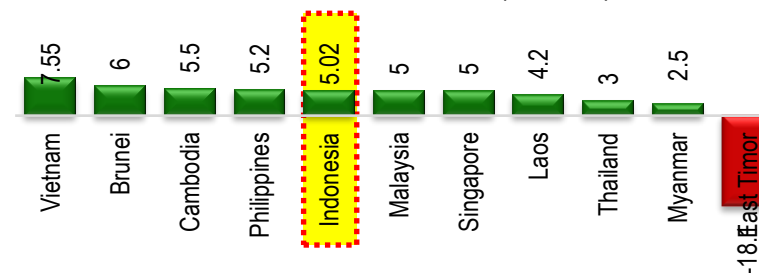
1		Amerika Serikat	PDB: \$26,95 Triliun
2		Cina	PDB: \$17,7 Triliun
3		Jerman	PDB: \$4,43 Triliun
4		Jepang	PDB: \$4,23 Triliun
5		India	PDB: \$3,73 Triliun
6		Britania Raya	PDB: \$3,33 Triliun
7		Perancis	PDB: \$3,05 Triliun
8		Italia	PDB: \$2,19 Triliun
9		Brazil	PDB: \$2,13 Triliun
10		Kanada	PDB: \$2,12 Triliun
11		Rusia	PDB: \$1,86 Triliun
12		Meksiko	PDB: \$1,81 Triliun
13		Korea Selatan	PDB: \$1,71 Triliun
14		Australia	PDB: \$1,69 Triliun
15		Spanyol	PDB: \$1,58 Triliun
16		Indonesia	PDB: \$1,42 Triliun
17		Turki	PDB: \$1,15 Triliun
18		Belanda	PDB: \$1,09 Triliun
19		Arab Saudi	PDB: \$1,07 Triliun
20		Swiss	PDB: \$905,68 Miliar

Pertumbuhan Ekonomi di **Beberapa Negara Dunia**
Per Triwulan IV Tahun 2024 (Y-on-Y) %

Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Peringkat **41** dari **185** negara di dunia (Diurutkan dari Persentase PDB (y-o-y) tertinggi hingga terendah)

Pertumbuhan Ekonomi di **Negara-Negara G20**
Per Triwulan IV Tahun 2024 (Y-on-Y) %

Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Peringkat **3** dari **24** negara G20 (Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah)

Pertumbuhan Ekonomi di **Negara-Negara ASEAN**
Per Triwulan IV Tahun 2024 (Y-on-Y) %

Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB Indonesia Peringkat **5** dari **11** negara ASEAN (Diurutkan dari Tingkat Pertumbuhan Tahunan PDB tertinggi hingga terendah)

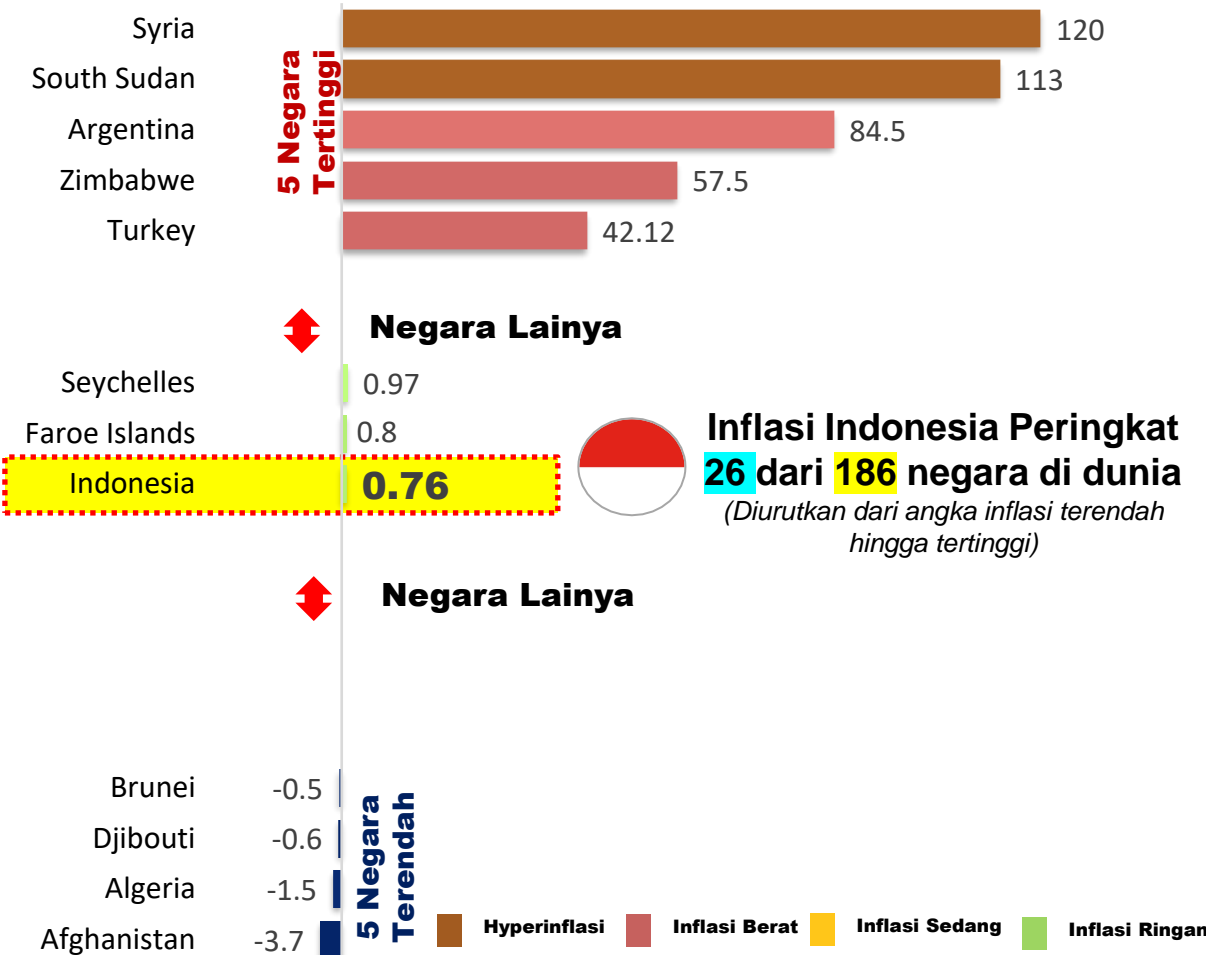
Indonesia menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sepanjang tahun 2024. Sektor industri pengolahan atau manufaktur masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan 18,67% dari total perekonomian Indonesia.



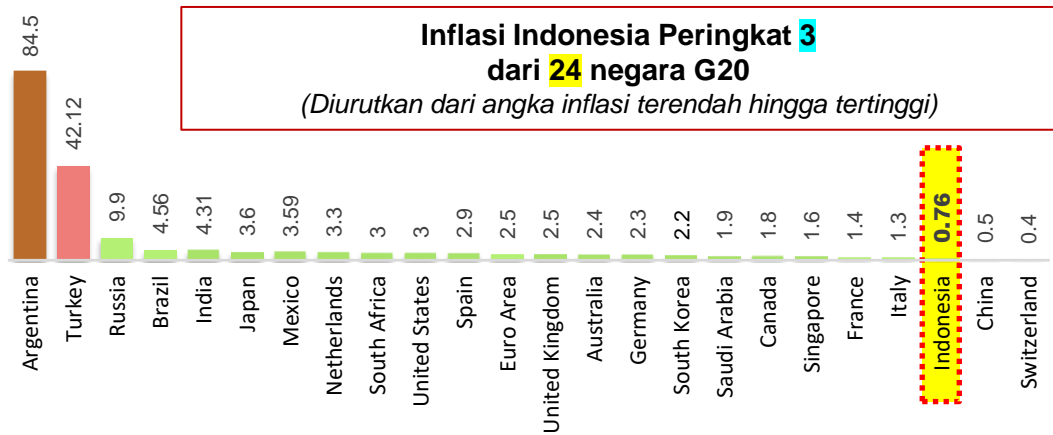
III. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI DUNIA DAN INDONESIA

PERBANDINGAN TINGKAT INFLASI DI BEBERAPA NEGARA DUNIA DENGAN INDONESIA PER JANUARI 2025 (Y-ON-Y)

Tingkat Inflasi di Beberapa Negara di Dunia
Per Januari 2025 (Y-on-Y) %



Tingkat Inflasi di Negara-Negara G20
Per Januari 2025 (Y-on-Y) %

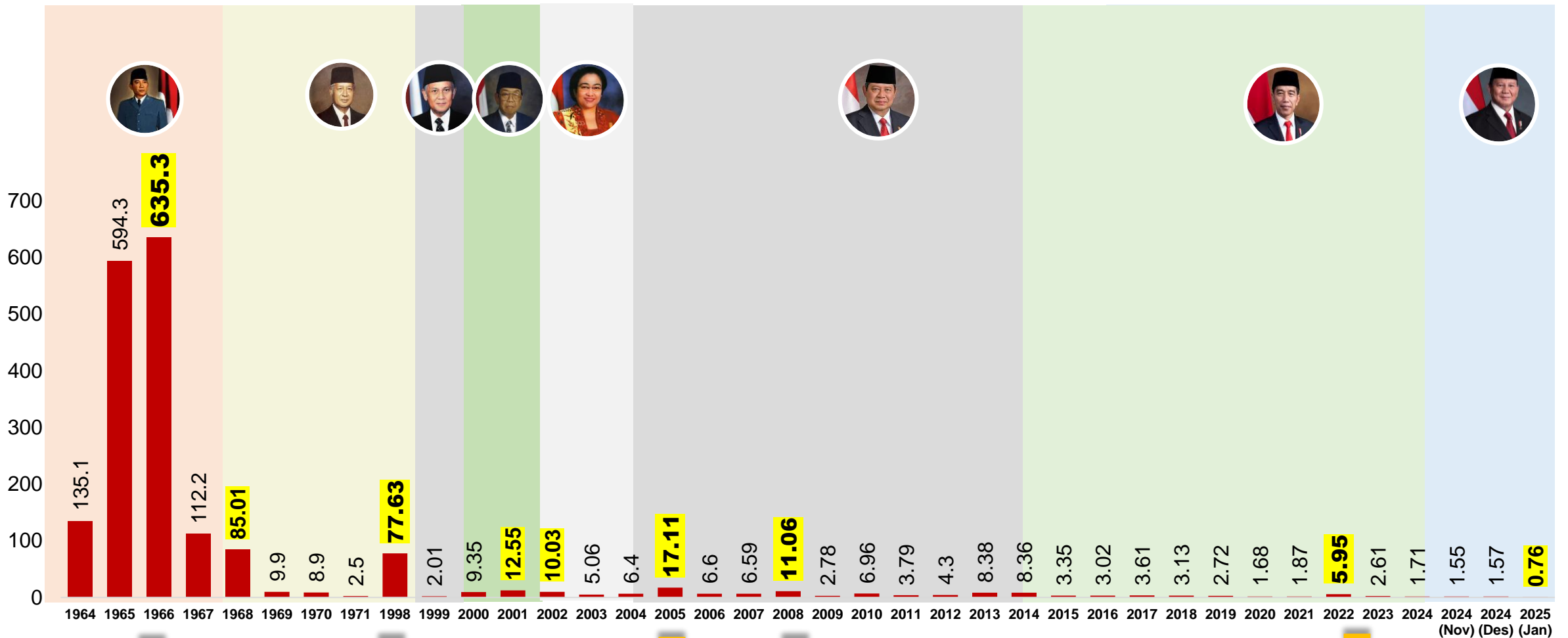


Tingkat Inflasi di Negara-Negara ASEAN
Per Januari 2025 (Y-on-Y) %



SEJARAH INFLASI INDONESIA

Dalam Persen (%)



Nilai mata uang Rupiah mengalami inflasi hingga 635,4%. (Hiperinflasi Indonesia 1967-1967)

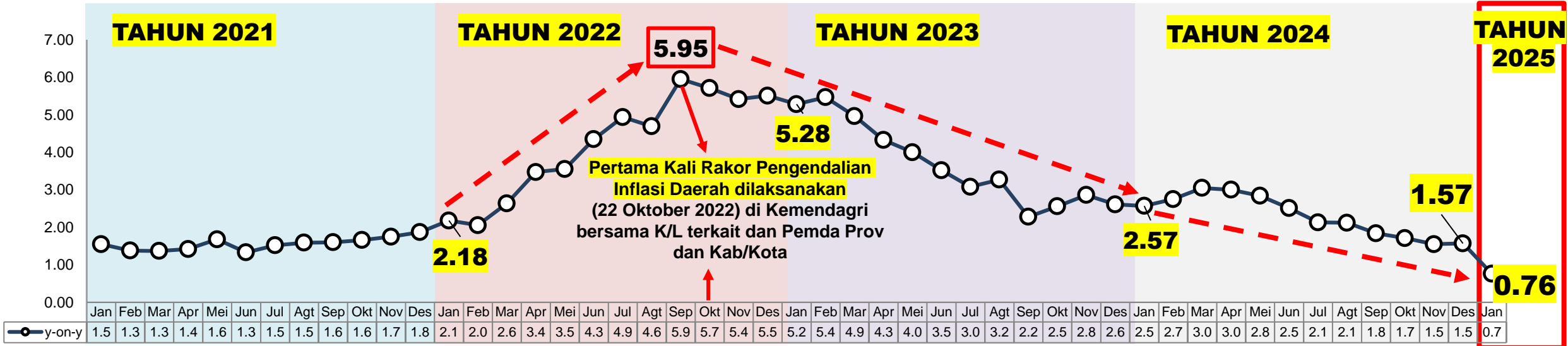
Inflasi mencapai angka 77,63% (Krisis Moneter 1998)

Inflasi yang tinggi pada tahun 2005 disebabkan oleh tingginya harga minyak dunia dan pada tahun 2008 Efek dari krisis subprime mortgage

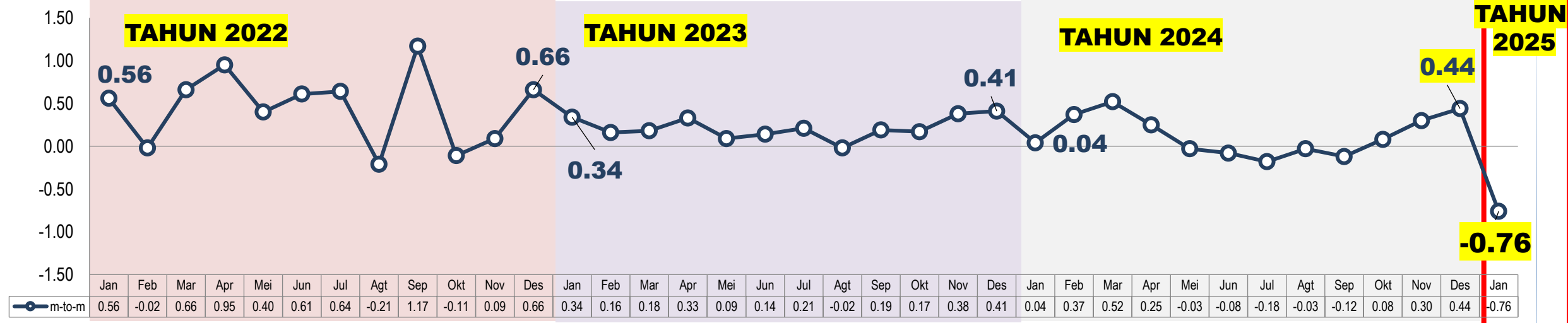
Inflasi tahunan pada bulan September 2022 menembus 5,95%. Sedangkan inflasi tahunan pada tahun 2022 mencapai 5,51%

DATA PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL TAHUN 2022 - 2025

INFLASI TAHUN KE TAHUN (y-on-y) %



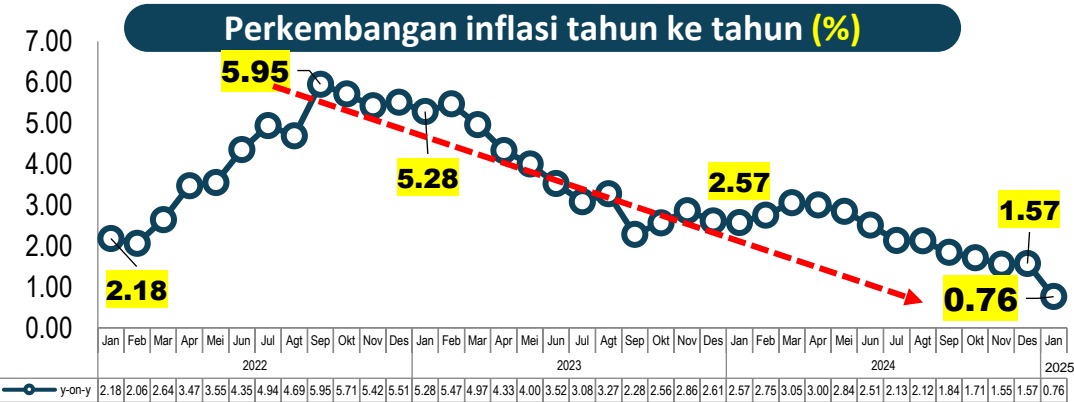
INFLASI BULAN KE BULAN (m-to-m) %



Inflasi Tahun ke Tahun

(Januari 2025 terhadap Januari 2024)

0,76%



Inflasi Berdasarkan Kelompok (y-on-y,%)

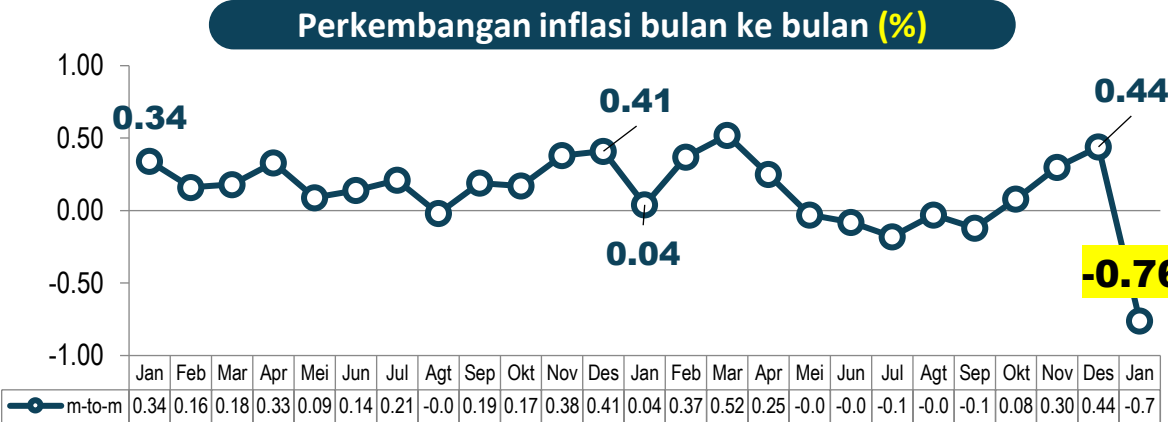
Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
INFLASI UMUM	0,76	0,76
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	3,69	1,07
2. Pakaian dan Alas Kaki	1,24	0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-8,75	-1,39
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,14	0,06
5. Kesehatan	1,84	0,05
6. Transportasi	0,76	0,09
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,30	-0,02
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,11	0,02
9. Pendidikan	2,05	0,12
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,47	0,25
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,27	0,45

Sumber: Rilis BPS 9 Februari 2025, Diolah 16 Februari 2025

Inflasi Bulan ke Bulan

(Januari 2025 terhadap Desember 2024)

-0,76%



Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum	-0,76	-0,76
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,94	0,56
2. Pakaian dan Alas Kaki	0,10	0,01
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-9,16	-1,44
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,13	0,01
5. Kesehatan	0,40	0,01
6. Transportasi	0,18	0,02
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,08	-0,01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,20	~0
9. Pendidikan	0,13	0,01
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,30	0,03
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,60	0,04

Keterangan: ~0 bernilai sangat kecil

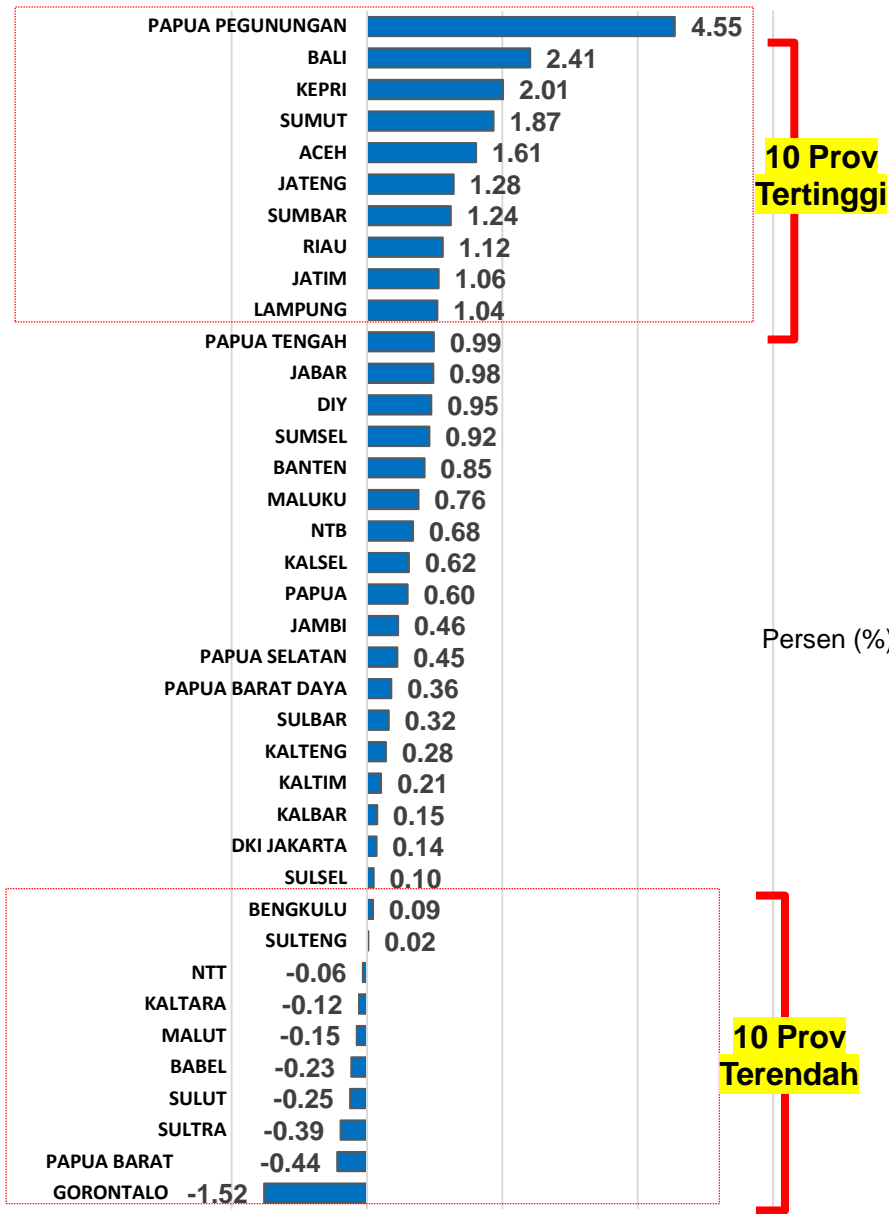


KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



Inflasi Per-Provinsi (y-o-y)



BULAN JANUARI 2025

Persen (%)

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

-1.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

-7.00

-8.00

-9.00

-10.00

-11.00

-12.00

-13.00

-14.00

-15.00

-16.00

-17.00

-18.00

-19.00

-20.00

-21.00

-22.00

-23.00

-24.00

-25.00

-26.00

-27.00

-28.00

-29.00

-30.00

-31.00

-32.00

-33.00

-34.00

-35.00

-36.00

-37.00

-38.00

-39.00

-40.00

-41.00

-42.00

-43.00

-44.00

-45.00

-46.00

-47.00

-48.00

-49.00

-50.00

-51.00

-52.00

-53.00

-54.00

-55.00

-56.00

-57.00

-58.00

-59.00

-60.00

-61.00

-62.00

-63.00

-64.00

-65.00

-66.00

-67.00

-68.00

-69.00

-70.00

-71.00

-72.00

-73.00

-74.00

-75.00

-76.00

-77.00

-78.00

-79.00

-80.00

-81.00

-82.00

-83.00

-84.00

-85.00

-86.00

-87.00

-88.00

-89.00

-90.00

-91.00

-92.00

-93.00

-94.00

-95.00

-96.00

-97.00

-98.00

-99.00

-100.00

-101.00

-102.00

-103.00

-104.00

-105.00

-106.00

-107.00

-108.00

-109.00

-110.00

-111.00

-112.00

-113.00

-114.00

-115.00

-116.00

-117.00

-118.00

-119.00

-120.00

-121.00

-122.00

-123.00

-124.00

-125.00

-126.00

-127.00

-128.00

-129.00

-130.00

-131.00

-132.00

-133.00

-134.00

-135.00

-136.00

-137.00

-138.00

-139.00

-140.00

-141.00

-142.00

-143.00

-144.00

-145.00

-146.00

-147.00

-148.00

-149.00

-150.00

-151.00

-152.00

-153.00

-154.00

-155.00

-156.00

-157.00

-158.00

-159.00

-160.00

-161.00

-162.00

-163.00

-164.00

-165.00

-166.00

-167.00

-168.00

-169.00

-170.00

-171.00

-172.00

-173.00

-174.00

-175.00

-176.00

-177.00

-178.00

-179.00

-180.00

-181.00

-182.00

-183.00

-184.00

-185.00

-186.00

-187.00

-188.00

-189.00

-190.00

-191.00

-192.00

-193.00

-194.00

-195.00

-196.00

-197.00

-198.00

-199.00

-200.00

-201.00

-202.00

-203.00

-204.00

-205.00

-206.00

-207.00

-208.00

-209.00

-210.00

-211.00

-212.00

-213.00

-214.00

-215.00

-216.00

-217.00

-218.00

-219.00

-220.00

-221.00

-222.00

-223.00

-224.00

-225.00

-226.00

-227.00

-228.00

-229.00

-230.00

-231.00

-232.00

-233.00

-234.00

-235.00

-236.00

-237.00

-238.00

-239.00

-240.00

-241.00

-242.00

-243.00

-244.00

-245.00

-246.00

-247.00

-248.00

-249.00

-250.00

-251.00

-252.00

-253.00

-254.00

-255.00

-256.00

-257.00

-258.00

-259.00

-260.00

-261.00

-262.00

-263.00

-264.00

-265.00

-266.00

-267.00

-268.00

-269.00

-270.00

-271.00

-272.00

-273.00

-274.00

-275.00

-276.00

-277.00

-278.00

-279.00

-280.00

-281.00

-282.00

-283.00

-284.00

-285.00

-286.00

-287.00

-288.00

-289.00

-290.00

-291.00

-292.00

-293.00

-294.00

-295.00

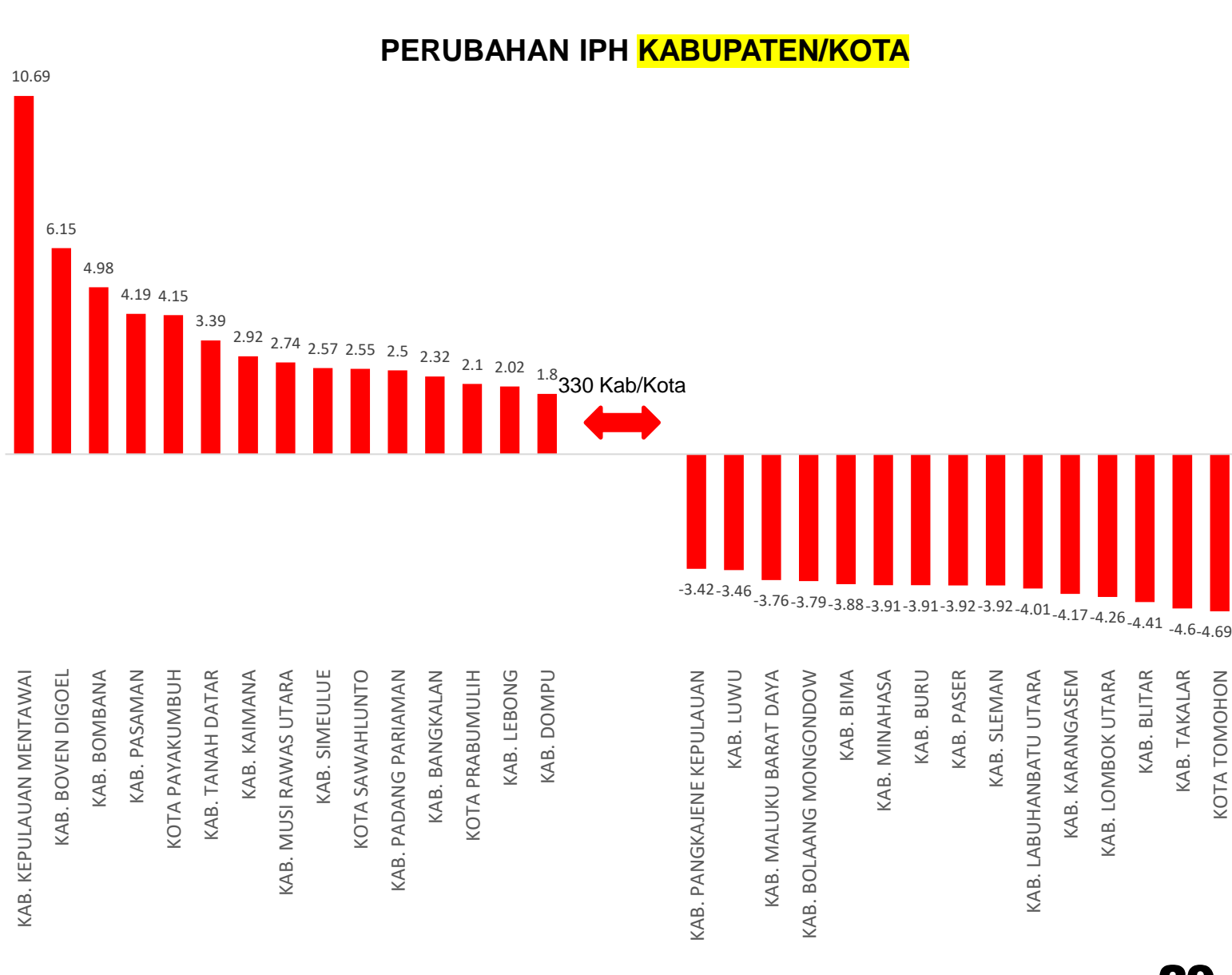
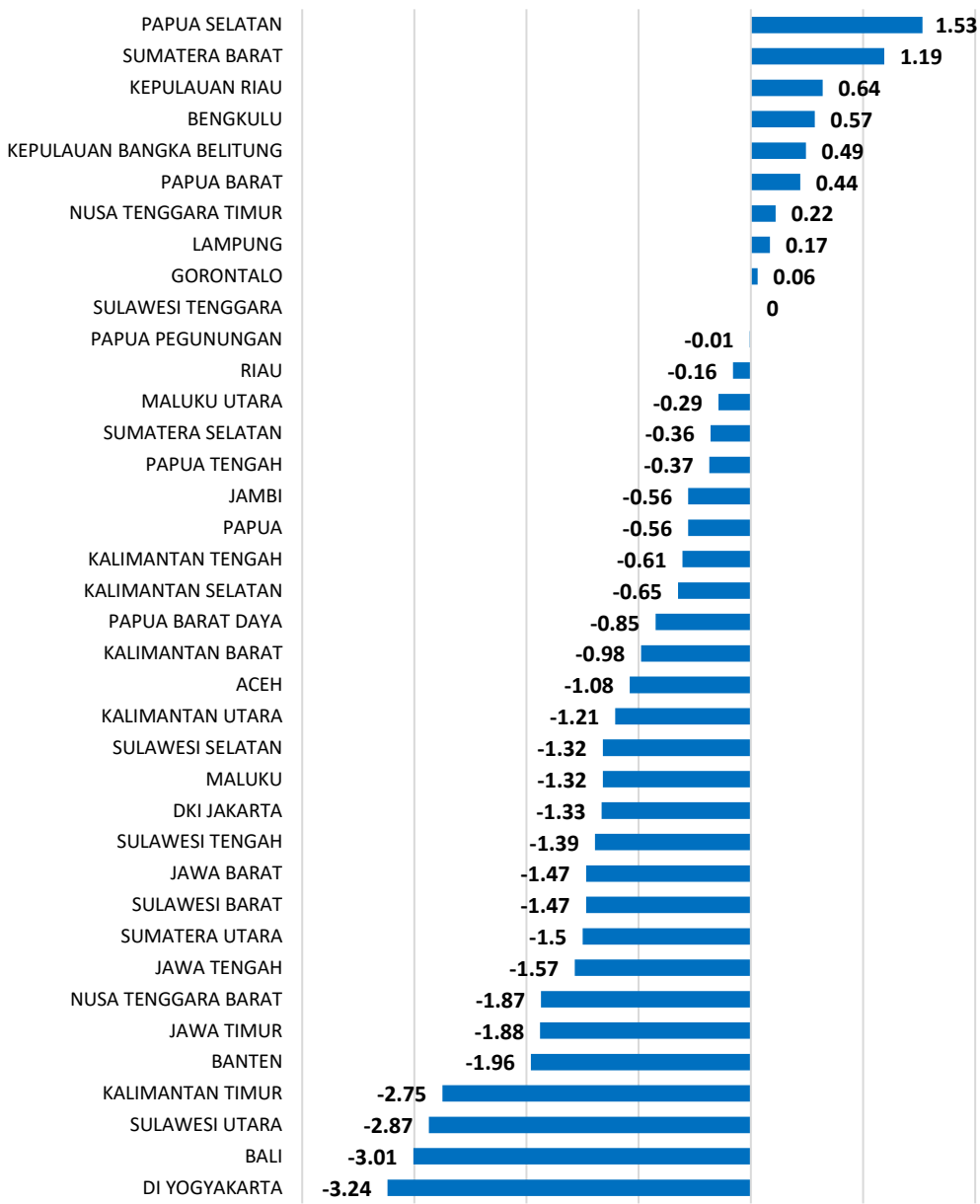
-296.00

-297.00

-298.00

-299.00

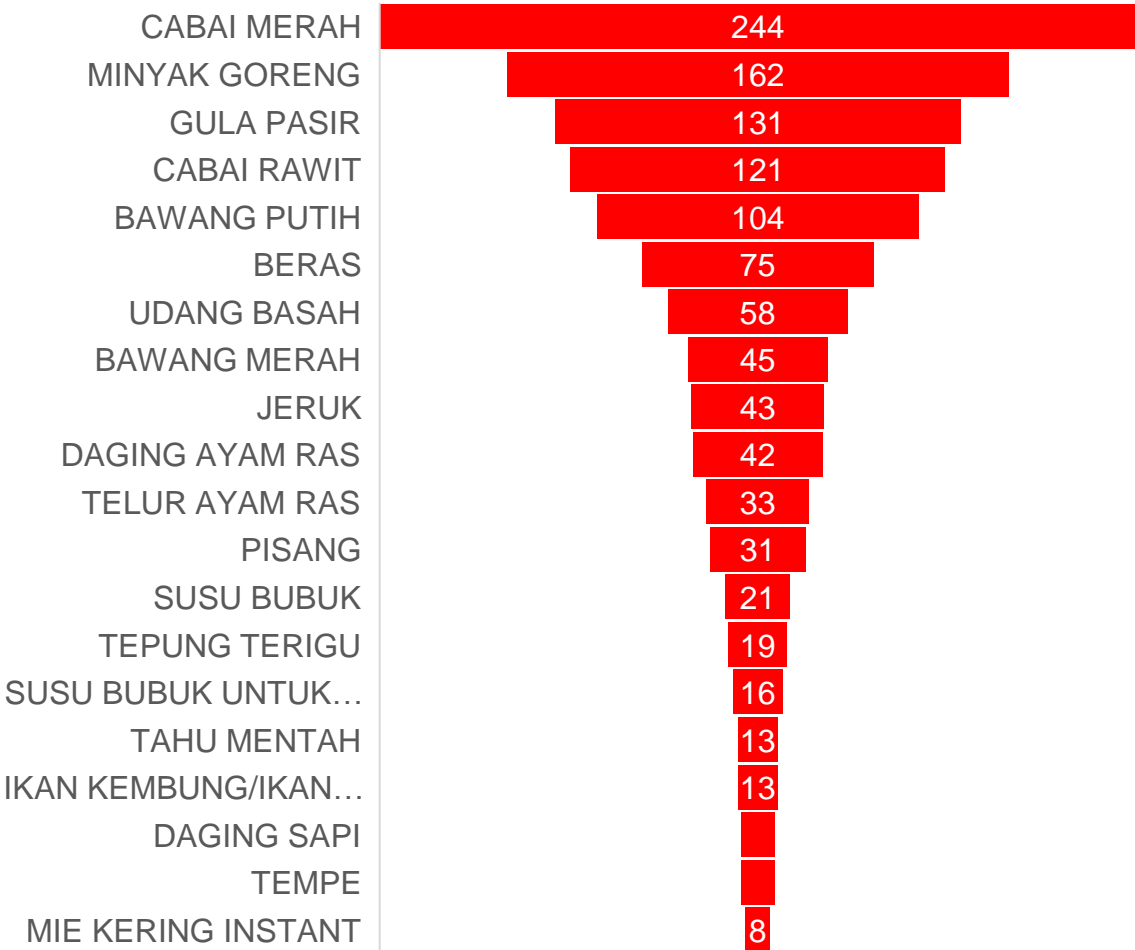
PERUBAHAN INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (IPH) DI DAERAH (%)
PADA MINGGU II FEBRUARI TAHUN 2025



Sumber: Hasil Monev diolah Tim, 16 Februari 2025

PERUBAHAN INDEKS PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN MINGGU II FEBRUARI 2025

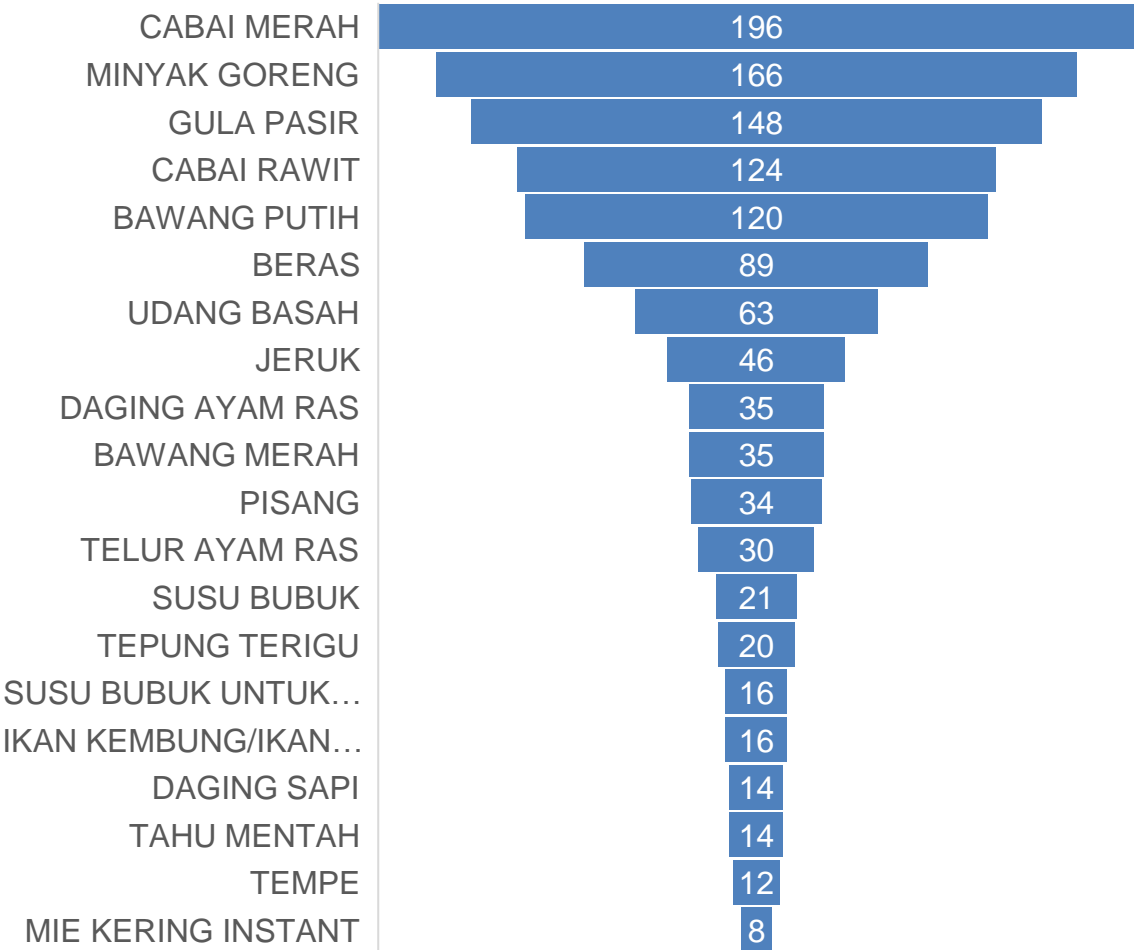
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGALAMI KENAIKAN IPH MINGGU I FEBRUARI 2025 MENURUT KOMODITAS



Minggu I Februari 2025, komoditas yang mengalami kenaikan:

- a. Cabai Merah di 244 daerah kabupaten/kota
- b. Minyak Goreng di 162 daerah kabupaten/kota
- c. Gula Pasir di 131 daerah kabupaten/kota

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENGALAMI KENAIKAN IPH MINGGU II FEBRUARI 2025 MENURUT KOMODITAS



Minggu II Februari 2025, komoditas yang mengalami kenaikan:

- a. Cabai Merah di 196 daerah kabupaten/kota
- b. Minyak Goreng di 166 daerah kabupaten/kota
- c. Gula Pasir di 148 daerah kabupaten/kota

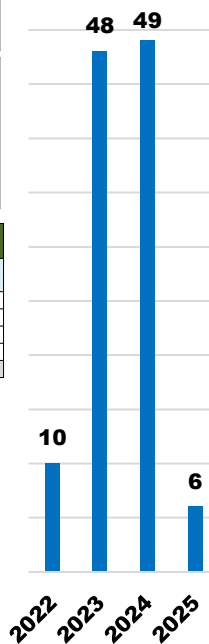


ANEV MINGGUAN (RAKOR) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH OLEH KEMENDAGRI BERSAMA K/L & PEMDA

Telah Dilaksanakan
Anev Mingguan
(Rakor)
Pengendalian
Inflasi Sebanyak

112

Sejak
24 Oktober 2022
sampai dengan
17 Februari 2025



Kemendagri secara mingguan mengadakan
Analisis dan Evaluasi (Anev) atau Rapat
Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah
bersama K/L terkait dan Pemda



Narasumber Rakor dari Instansi Pusat:

Kemendag, Kementan, BPS, Bapanas,
Perum Bulog, TNI, Polri, Kejangung



Peserta Rakor Inflasi:

Seluruh Provinsi dan Kab/Kota, serta
Forkopimda tingkat Provinsi dan Kab/Kota



**Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara mingguan akan terus dilaksanakan
sampai ada perintah dari Presiden RI untuk di stop**



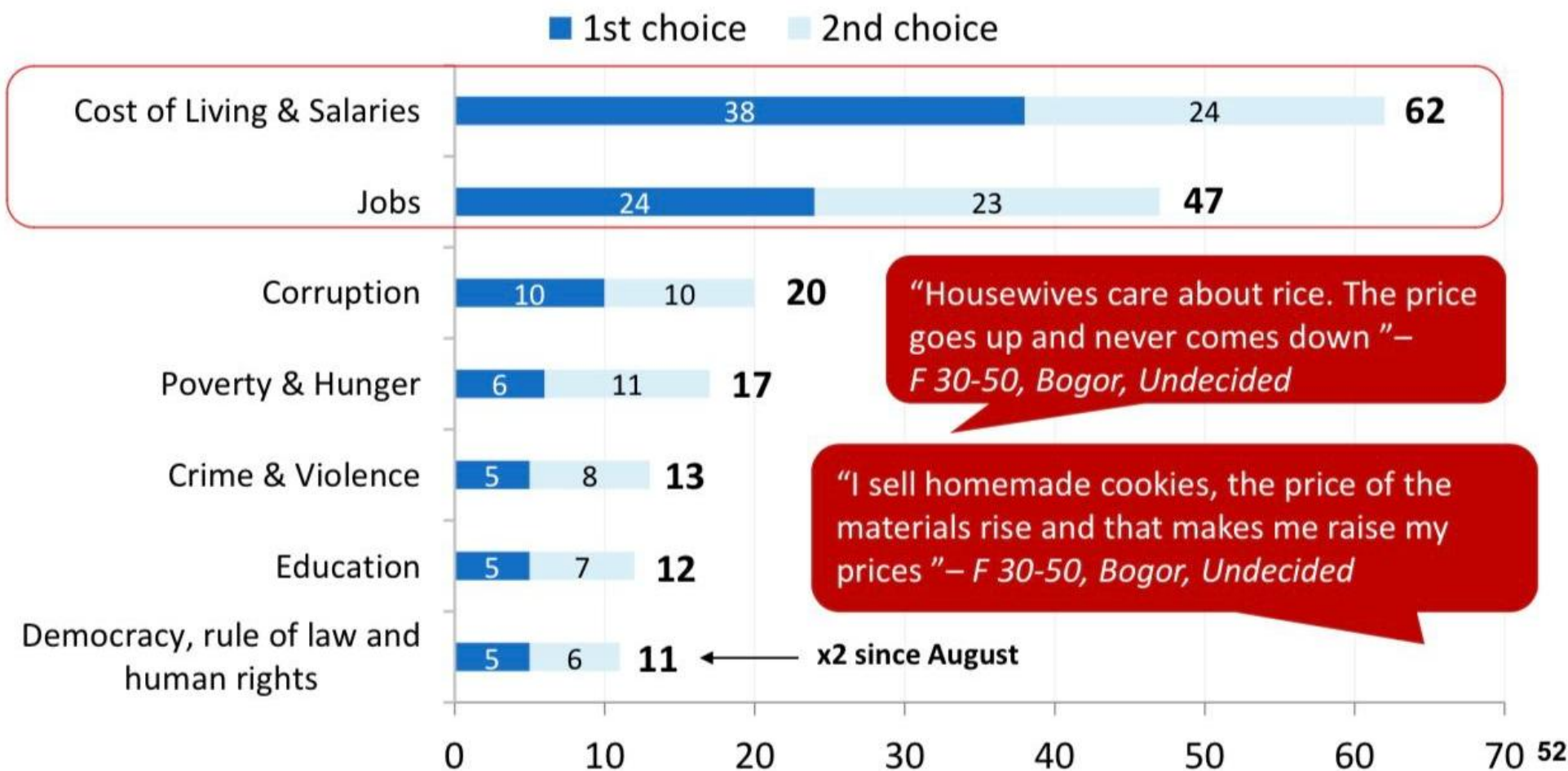
SIMPULAN HASIL MONEV TIM APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

UPAYA YANG DILAKUKAN DAN DILAPORKAN PEMDA DALAM TAHUN 2025

No	Kegiatan	JUMLAH PEMDA	
		10 Februari 2025	17 Februari 2025
1	Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia	0	138
2	Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah	0	72
3	Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting	0	19
4	Pencanangan gerakan menanam	0	17
5	Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait	0	24
6	Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang	0	27
7	Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan	0	4
8	Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian Inflasi	0	1
9	Memberikan bantuan transportasi dari APBD	0	4

But only one issue dominates

What would you say is the most important issue facing Indonesia that you would like the government to focus on? (2 answers – all responses over 10% displayed)



PENYEBAB DAN JENIS INFLASI

Inflasi dapat diartikan sebagai **kenaikan harga Kebutuhan hidup dalam waktu yang lama**



Penyebab Inflasi, antara lain:

1. Uang negara beredar lebih banyak → Banyak mencetak uang
2. Kenaikan suku bunga
3. Supply barang kurang → Impor, Produksi dalam negeri
4. Distribusi Komoditas yang terganggu, penyebabnya antara lain:
 - a. Menghentikan distribusi (Menimbun Barang)
 - b. Masalah Transportasi
 - 1) Kenaikan harga BBM
 - 2) Kerusakan Infrastruktur
 - 3) **Gangguan cuaca (Climate change) di daerah tertentu**
5. **Pupuk Subsidi Mahal**

Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya



Inflasi Volatile Goods

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan **harga yang berubah (berubah karena market → invisible hand)**. Inflasi volatile goods didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai **volatile foods**. Contoh barang/jasa **volatile foods** diantaranya:



Ayam Ras



Cabai Rawit



Beras

Core inflation (Inflasi Inti)

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan **harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum** dan akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum yang **sifatnya cenderung permanen dan persisten**. Contoh barang/jasa **Core Inflation** diantaranya:



Emas
Perhiasan



Suku Bunga
Bank

Inflasi Administered Prices

adalah inflasi barang/jasa yang perkembangan **harganya diatur pemerintah**. Harga suatu barang atau jasa **Administered Prices** yang beredar di masyarakat berdasarkan aturan pemerintah. Contoh barang/ jasa **Administered Prices** diantaranya:



Tarif Dasar
Listrik



Bahan Bakar
Minyak



Tarif
Transportasi

PEMBERIAN INSENTIF PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

HISTORI PENYERAHAN INSENTIF FISKAL PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2023



Penyerahan Insentif Fiskal Periode Pertama, 31 Juli 2023



di Kemendagri, Jakarta

Total:			
33	3	24	6
	Provinsi	Kabupaten	Kota

1. Prov. DKI Jakarta
2. Prov. Kalimantan Tengah
3. Prov. Gorontalo
4. Kab. Aceh Barat
5. Kab. Aceh Besar
6. Kab. Aceh Selatan
7. Kab. Gayo Lues
8. Kab. Indragiri Hilir
9. Kab. Bungo
10. Kab. Merangin
11. Kab. Banyuasin
12. Kab. Ogan Ilir
13. Kab. Bengkulu Utara
14. Kab. Bekasi
15. Kab. Garut
16. Kab. Pangandaran
17. Kab. Jepara
17. Kab. Sleman
18. Kab. Banyuwangi
20. Kab. Sintang
21. Kab. Kayong Utara
22. Kab. Sukamara
23. Kab. Minahasa Selatan
24. Kab. Halmahera Timur
25. Kab. Halmahera Selatan
26. Kab. Bangka Tengah
27. Kota Puhwato
28. Kota Langsa
29. Kota Gunungsitoli
30. Kota Payakumbuh
31. Kota Dumai
32. Kota Bitung
33. Kota Serang

Penyerahan Insentif Fiskal Periode Kedua, 3 Oktober 2023



di Kemenkeu, Jakarta

Total:			
33	3	24	6
	Provinsi	Kabupaten	Kota

1. Prov. Sulawesi Tengah
2. Prov. DKI Jakarta
3. Prov. Sumatera Barat
4. Kab. Pidie Jaya
5. Kab. Temanggung
6. Kab. Sumbawa
7. Kab. Melawi
8. Kab. Wajo
9. Kab. Kolaka Utara
10. Kab. Banggai
11. Kab. Mamuju
12. Kab. Magetan
13. Kab. Aceh Barat
14. Kab. Kutai Kartanegara
15. Kab. Konawe Utara
16. Kab. Kolaka
17. Kab. Enrekang
18. Kab. Morowali
19. Kab. Konawe Selatan
20. Kab. Malang
21. Kab. Garut
22. Kab. Kutai Timur
23. Kab. Tojo Una Una
24. Kab. Trenggalek
25. Kab. Tabalong
26. Kab. OKU Timur
27. Kab. Sarolangun
28. Kota Subulussalam
29. Kota Tidore Kepulauan
30. Kota Gunungsitoli
31. Kota Sabang
32. Kota Banjarbaru
33. Kota Dumai

Penyerahan Insentif Fiskal Periode Ketiga, 6 November 2023



di Kemendagri, Jakarta

Total:			
34	3	25	6
	Provinsi	Kabupaten	Kota

1. Provinsi Sulawesi Barat
2. Provinsi Gorontalo
3. Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kab. Aceh Singkil
5. Kab. Pasaman
6. Kab. Bandung
7. Kab. Banyuwangi
8. Kab. Lamongan
9. Kab. Landak
10. Kab. Pulang Pisau
11. Kab. Tabalong
12. Kab. Kutai Kartanegara
13. Kab. Paser
14. Kab. Bolaang Mongondow
15. Kab. Minahasa Selatan
16. Kab. Minahasa Utara
17. Kab. Banggai
18. Kab. Morowali
19. Kab. Parigi Moutong
20. Kab. Luwu
21. Kab. Sumbawa Barat
22. Kab. Supiori
23. Kab. Pulau Morotai
24. Kab. Bangka Selatan
25. Kab. Boalemo
26. Kab. Pohuwato
27. Kab. Sorong Selatan
28. Kab. Bulungan
29. Kota Subulussalam
30. Kota Sibolga
31. Kota Pagar Alam
32. Kota Tidore Kepulauan
33. Kota Singkawang
34. Kota Banjarbaru



PENYERAHAN INSENTIF FISKAL PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH PERIODE PERTAMA TAHUN 2024

Keputusan

Menkeu No. 295 Tahun 2024

Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota (Ditetapkan 15 Juli 2024)



Penyerahan Insentif Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi Daerah TA 2024

Periode Pertama kepada:


50
Pemda

Total Anggaran:

Rp300.000.000.000

(Tiga Ratus Miliar Rupiah)

Dalam Ribuan Rupiah

<div><div><p>KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 295 TAHUN 2024 TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p></div><div><p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;</p><p>Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);</p><p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN KATEGORI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.</p><p>KESATU : Menetapkan alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);</p><p>KEDUA : Rincian alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.</p></div></div> <div><p>aku pada tanggal ditetapkan. dan kepada: negeri Republik Indonesia; rian Keuangan; ian Keuangan; an Keuangan, Kementerian urusan, Kementerian stif, Ekonomi Khusus, dan deral Perimbangan Keuangan; bersangkutan.</p><p>arta uli 2024 GAN REPUBLIK INDONESIA</p><p>nyan secara elektronik LYANI INDRAMATI</p></div>	
--	--

4 Provinsi Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Miliar Rupiah)		
1	Provinsi Lampung	6.827.578
2	Provinsi Kalimantan Barat	5.251.983
3	Provinsi Kalimantan Tengah	5.734.723
4	Provinsi Sulawesi Selatan	6.185.716

10 Kota Rp60.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah)		
1	Kota Sabang	6.022.870
2	Kota Padang Panjang	5.448.001
3	Kota Payakumbuh	5.598.094
4	Kota Bandar Lampung	6.489.808
5	Kota Cimahi	6.112.728
6	Kota Blitar	5.581.014
7	Kota Banjarbaru	5.878.382
8	Kota Banjarmasin	5.789.312
9	Kota Bitung	5.997.392
10	Kota Gorontalo	7.082.399

36 Kabupaten Rp216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Rupiah)					
1	Nagan Raya	5.848.393	19	Mojokerto	6.334.858
2	Padang Pariaman	5.973.268	20	Nganjuk	6.071.658
3	Tanah Datar	5.833.106	21	Pacitan	5.719.735
4	Siak	6.737.125	22	Ponorogo	5.940.637
5	Tebo	5.645.348	23	Trenggalek	5.781.629
6	Musi Banyuasin	5.609.297	24	Kutai Kartanegara	6.115.990
7	Musi Rawas	5.760.862	25	Minahasa	6.392.021
8	Banyuasin	6.830.771	26	Minahasa Utara	5.854.126
9	Lampung Barat	5.571.073	27	Kep.Siau Tagulandang Biaro	5.664.569
10	Lampung Selatan	5.581.828	28	Bolaang Mongondow Utara	6.495.441
11	Pringsewu	5.903.457	29	Minahasa Tenggara	5.809.510
12	Bekasi	5.980.480	30	Banggai Kepulauan	5.764.023
13	Bogor	5.563.166	31	Soppeng	5.618.535
14	Pangandaran	5.835.382	32	Klungkung	5.543.831
15	Bangkalan	6.298.428	33	Tangerang	6.531.521
16	Kediri	5.581.185	34	Pohuwato	5.960.343
17	Madiun	6.366.059	35	Bone bolango	5.890.678
18	Malang	7.206.976	36	Gorontalo utara	6.384.691

Bagi daerah yang telah mampu mengendalikan angka inflasinya perlu menjadi contoh dan diberikan apresiasi

IV. ARAHAN PRESIDEN: KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Teguran Presiden Prabowo soal Sungai Kotor ke Aparatur Wilayah, Warganet: Terima Kasih Pak!

📅 2025-02-13 16:47 💬 () 🔗 Share



Teguran Presiden Prabowo soal Sungai Kotor ke Aparatur Wilayah, Warganet: Terima Kasih Pak!

Presiden Prabowo kumpulkan pejabat daerah buat bahas isu lingkungan

© Minggu, 3 November 2024 19:51 WIB



Presiden RI Prabowo Subianto saat menyapa masyarakat di sela makan siang di Denpasar, Bali, Minggu (3/11/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliartari



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id

ARAHAN PRESIDEN: KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Prabowo Minta Toilet di Sekolah Harus Bagus untuk Mendukung Makan Bergizi Gratis



Raka Dwi Novianto

Sabtu, 18 Januari 2025 - 18:49 WIB



Presiden Prabowo Soroti Masalah Sampah dan Reklame yang Berjamur

Ni Kadek Novi Febriani – Kamis, 19 Desember 2024 | 07:15 WIB



GUNUNG SAMPAH: Kondisi penumpukan di TPA Suwung terus meningkat dan diperingatkan Presiden Prabowo. (MIFTAHUDDIN HALIM/radarbali.id)



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id



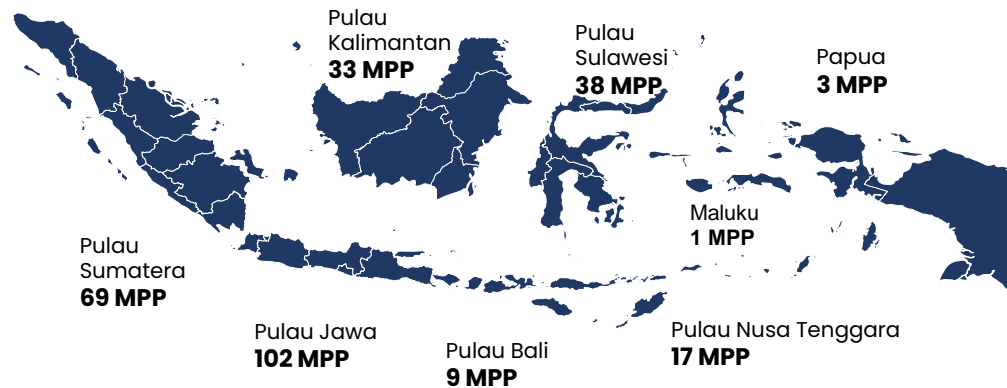
1. **Melakukan penataan pemasangan reklame** yang meliputi papan billboard, megatron, videotron, *Large Electronic Display* (LED), reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan/kendaraan, reklame udara, reklame suara, reklame film/slide, reklame pegangan, reklame apung, reklame *graffiti*, dan jenis reklame lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Memfasilitasi perizinan titik pemasangan reklame** dengan memperhatikan standar kebersihan, estetika, ketertiban, keselamatan, kemanfaatan, kenyamanan, dan pendapatan daerah serta jangka waktu pemasangan.
3. **Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di daerah, pemegang reklame, dan pihak terkait lainnya** dalam kegiatan penertiban pemasangan reklame tanpa izin pada tiang ataupun pada 1 (satu) guna memastikan reklame sesuai dengan aspek kebersihan, estetika, ketertiban, keselamatan, kemanfaatan, kenyamanan, perkotaan, dan pendapatan daerah serta jangka waktu pemasangan.
4. **Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai** dengan standar kebersihan, estetika, ketertiban, keselamatan, kemanfaatan, kenyamanan, perkotaan, dan pendapatan daerah serta jangka waktu pemasangan.
5. **Melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberian izin pemasangan reklame** kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan setiap triwulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan



V. MAL PELAYANAN PUBLIK DAN *EMERGENCY CALL*



Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

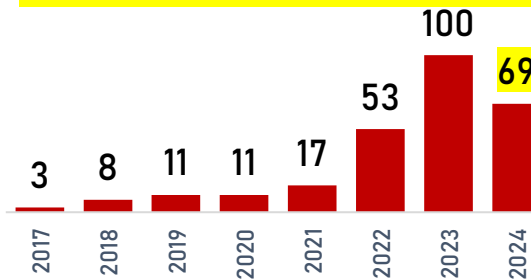


Jumlah MPP

272

54% dari total 508
Kab/Kota

Jumlah MPP Diresmikan Tahun 2017-2024



Strategi Penyelenggaraan MPP

- 1 Inventarisasi data berdasarkan kewilayahan (daratan, kepulauan dan pegunungan) dalam pembentukan MPP
- 2 Dukungan pembentukan Struktur kelembagaan MPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan MPP,
- 3 Pemenuhan standar kompetensi baik kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia dan pemberian bantuan Fiskal/anggaran kepada Daerah terkait penyelenggaraan MPP
- 4 Pemberian Tunjangan Khusus/Insentif/lainnya kepada Penyelenggara PTSP dikarenakan Beban Kerja yang sangat tinggi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah

Contoh Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Badung



Dengan adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) ini akan **menciptakan situasi yang lebih kondusif** secara tidak langsung terhadap keamanan dalam negeri.

KUNJUNGAN KERJA MENDAGRI DAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENINJAUAN LAYANAN PBG DAN BPHTB

R.M.id PARLEMEN PEMILU GOVERNMENT ACTION PARPOL EKONOMI BISNIS NASIONAL INTERNASIONAL

Saksikan Layanan PBG, Mendagri Apresiasi Pemkot Tangerang
Reporter & Editor: FAQIH MUBAROK Government Action

Sabtu, 4 Januari 2025 08:55 WIB



Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat melakukan kunjungan ke Tangerang Low Room (TLR), Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (3/2025). Foto: istimedia

Kota Tangerang, Prov. Banten
Selasa, 14 Januari 2025
Pelayanan PBG:
4 Jam

ANTARA HOME POLITIK HUKUM EKONOMI METRO SEPAKBOLA OLAHRAGA HUKUMADRA LAINNYA

Dua menteri puji kinerja mal pelayanan publik di Gianyar
Sabtu, 25 Januari 2025 17:19 WIB



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (baju putih) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwatar Sniat meninjau mal pelayanan publik (MPP) di kabupaten Gianyar (Dok: Humas Gianyar)

Kab Gianyar, Prov. Bali
Jum'at, 24 Januari 2025
Pelayanan PBG:
14 Menit 18 Detik

radarsuara Pertanian & Peternakan Kehutanan Lingkungan Hidup Kelautan & Perikanan

Layanan PBG Kurang dari 3 Jam Akan Diterapkan di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat
Friday, 17 January 2025 15:55 WIB



Kab. Sumedang, Prov. Jabar
Rabu, 15 Januari 2025
Pelayanan PBG:
53 Menit

Kemendagri


Mampu Proses Perizinan PBG Selama 17 Menit, Mendagri Apresiasi Pemprov DKI Jakarta
Selasa, 20 Januari 2025



Prov. DKI Jakarta
Senin, 20 Januari 2025
Pelayanan PBG:
17 Menit 31 Detik

MEDIAJABAR Home Daerah

Terima Kunjungan Kerja Mendagri Tito Karnavian, Pj Bupati Subang: Pelayanan Publik Terus Ditingkatkan
Yanto Santoso — Rabu, 22 Januari 2025



Kab. Subang, Prov. Jabar
Selasa, 21 Januari 2025
Pelayanan PBG:
16 Menit 33 Detik

baliilu.com


Kunjungan Mendagri dan Menteri PKP ke MPP Kabupaten Badung
BALI, 23 Januari 2025 2 minggu yang lalu · 23 Januari 2025
Reporter: baliilu



Kab. Badung, Prov. Bali
Kamis, 23 Januari 2025
Pelayanan PBG:
17 Menit 28 Detik



LAYANAN CALL CENTER CENTER EMERGENCY 112



SMART CITY
NUSANTARA

LAYANAN CALL CENTER EMERGENCY 112

Penyediaan layanan call center terpadu 112 merupakan sistem layanan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk menerima pengaduan atau laporan dimana terjadinya kondisi darurat yang saling terintegrasi. Sistem layanan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar kejadian kondisi darurat dapat segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan lokasi Kabupaten/Kota masing-masing.



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id

Setara Amerika Serikat, War Room Kota Makassar Dilengkapi Sistem CCTV Canggih

Pewarta **Anja Arowana** - 23 July 2017 11:58 AM



Mini War Room di stan Kota Makassar, ICE Apeksi 2017. (Anja Arowana)

MALANGVOICE – Pemerintah Kota Makassar membuktikan kotanya layak dijuluki Smart City karena berbagai inovasinya. Salah satu gebrakan yang baru dirilis adalah War Room, yaitu program pemasangan CCTV di berbagai penjuru daerah di Makassar yang bertujuan menekan angka kriminalitas di kota anqin mamiri tersebut.

Makassar, Kota dengan Sistem CCTV Komprehensif Pertama di Indonesia



13 April 2017 21:14 | Diperbarui: 13 April 2017 21:47



Wali Kota Makassar sedang memantau aktivitas kota di War Room Pemkot Makassar. (foto: makassar.tribunnews.com)



Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian terkesima dengan inovasi Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto yang sukses membangun sistem CCTV (Closed Circuit Television) kota yang komprehensif.

Sukses Deteksi Bom Bunuh Diri, CCTV Makassar Bakal Ditambah Ribuan Titik



- **WAR ROOM** – Ruang kontrol yang dikendalikan Pemkot Makassar ini berada di Balaikota. Ketika terjadi peristiwa bom bunuh diri, Minggu 28 Maret 2021, kontrol ruangan ini yang dihubungkan dengan ratusan CCTV berhasil mendeteksi pelaku sehingga memudahkan proses identifikasi.





Mall Pelayanan Publik, Banyuwangi-Jawa Timur



Ruang kontrol CCTV, Surabaya-Jawa Timur



Mall Pelayanan Publik, Kota Bogor-Jawa Barat



Tonggak awal kebebasan pers di Indonesia yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.



Strategi Alternatif Penyampaian Aspirasi di Indonesia

Area Patung Kuda,
Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Lt. 5, RT.5/RW.2, Gambir.



KONTAN/Fransiskus Simbolon



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH



kemendagri



kemendagriRI



kemendagri.go.id

